

**PERANG & GLOBALISASI;
INDONESIA “UNDER ATTACK” KONSPIRASI MEMENANGKAN OPINI
HINGGA PENGUASAAN SUMBER DAYA INDONESIA**

Abstrak

Globalisasi menampakkan dua wajahnya sekaligus, wajah perubahan konstruktif sekaligus destruktif. Tiap negara mulai mempertahankan aset dan sumber dayanya masing-masing. Sebagian yang lain berupaya menguasai sumber daya negara lain. Perebutan sumber-sumber daya tersebut mau tidak mau, dan suka tidak suka melahirkan “perang-perang” baik fisik, mental atau perang opini. Kesemuanya bermuara pada penguasaan penuh atas sumber daya suatu negara. Lalu bagaimana perang opini tersebut terjadi? Apakah perang opini tersebut merupakan legitimasi untuk menguasai sumber-sumber daya yang ada di Indonesia? Sumber daya apa saja yang hendak dikuasai?. Setidaknya hal itu menjadi benang merah dari tulisan ini.

Dalam menopang kajian ini, kerangka konsep yang digunakan diantaranya yaitu konsep strukturasi Antony Giddens, *Public Sphere* milik Jurgen Habermas, dan *Imagined Communities* perspektif Ben Anderson. Guna mendapatkan temuan-temuan informasi yang mendalam, tulisan ini menggunakan metode studi kasus Robert K. Yin.

Kata Kunci: Globalisasi, Opini, Sumber Daya

**PERANG & GLOBALISASI;
INDONESIA “UNDER ATTACK” KONSPIRASI MEMENANGKAN OPINI
HINGGA PENGUASAAN SUMBER DAYA INDONESIA**

Dr. Heri Budianto M.Si
Didik Haryadi Santoso MA

Pendahuluan

Membicarakan dinamika Indonesia tentu tidak akan pernah ada habisnya. Segala bentuk peristiwa lahir dan hadir dari ujung Sabang sampai Marauke. Baik peristiwa lokal yang betul-betul berakar pada lokalitas maupun peristiwa lokal yang berdimensi transnasional dan global, semua hadir di Bumi Nusantara. Seorang kolega pedalaman di Kalimantan Barat memaparkan pengalamannya yang tidak diterima di perusahaan global lantaran faktor bahasa dan tuntutan sertifikat-sertifikat standar internasional. Sementara pekerja-pekerja asing dapat dengan mudah masuk dan bekerja dengan jumlah yang tidak sedikit, mencapai ribuan orang. Sekelumit cerita seorang kolega tersebut tentu tidak murni peristiwa lokal melainkan berdimensi global dengan silang sengkabut negara dan pasar beserta ragam kepentingannya. Pasar tenaga kerja kian sempit, tidak hanya itu, arus perdagangan dibuka seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Monopoli perdagangan pun digulirkan sebagaimana era penjajahan dahulu kala. Muaranya, pedagang-pedagang kecil di daerah terpaksa gulung tikar karena keterbatasan modal dan persaingan harga yang tidak sehat. Ini sekelumit cerita singkat di wilayah ekonomi.

Di wilayah politik, riuh rendah persoalan muncul setiap hari bahkan setiap menit. Opini saling bersahutan bertarung satu sama lain dengan ragam tujuannya. Mulai dari opini tingkatan yang paling sederhana hingga opini tingkat tinggi yang melibatkan jaringan korporasi global. Salah satu pameo yang cukup dikenal berbunyi: “Jika ingin mengubah sikap, tindakan, kebijakan dan sejenisnya, ubah saja sudut pandang dan opininya”. Sudut pandang dan opini ini kemudian menjadi salah satu “divisi” yang cukup penting dalam rangka penguasaan apa saja, bisa materiil ekonomi, politik, penguasaan budaya hingga penguasaan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain sebagainya.

Guna mencapai tujuan yang berorientasi pada pasar, kekuatan opini memang tidak dapat diremehkan. Ia menempati level persuasif yang tidak hanya berhenti pada level akal logika saja melainkan masuk kedalam ranah alam bawah sadar manusia. Dalam pengalaman berbagai negara, beberapa negara dikuasai melalui pertarungan fisik melalui agresi militer sebagaimana yang terjadi di Iraq, Afganistan dan lain sebagainya. Namun, sebagian kecil negara lainnya, dapat dengan mudah “dikuasai” hanya dengan melalui proses pertarungan opini yang disertai dengan paket dikte-dikte kebijakan yang justru menyandera kepentingan negara. Indonesia misalnya, pada era penjajahan, peperangan fisik menjadi pertarungan yang utama dan cukup menentukan. Belanda *versus* gerilyawan Nusantara atau Jepang *versus* pejuang kemerdekaan merupakan contoh penting pertarungan yang berdimensi fisik. Namun, era kekinian, perang fisik menjadi bukan hal yang utama.

Perang opini merupakan perang “kekinian” yang justru kadang lebih mematkan peran dan kehadiran Negara dalam berbagai bidang. Opini yang cukup konkrit pada era krisis 98 misalnya, IMF membentuk opini dan dikte menuntut pemerintah agar tidak lagi membantu IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) (Habibie, 2006: 273). Opini berupa dikte tersebut tidak hanya sampai disitu. Tawaran pinjaman hutang pun disuarakan berulang-ulang agar Indonesia bersedia meminjam dana dari instansi luar. Masih banyak contoh kasus lainnya yang hampir memiliki kesamaan dengan negara-negara lainnya.

Dalam tataran yang lebih luas, kerjasama pembentukan opini tentu melibatkan jaringan korporasi media berskala global. Iraq dan Saddam Husein selalu dilekatkan dengan bangunan opini tentang teroris serta senjata pemusnah massal. Meskipun dalam kenyataannya hal belum dapat dibuktikan oleh siapapun juga. Sebagian besar jaringan media massa global bersatu padu memperkuat opini-opini yang dirancang oleh Amerika. Namun demikian, tulisan ini tidak dalam rangka membongkar praktek spesialisasi media-media berskala global sebagaimana kajian ekonomi politik Vincent Mosco. Selain itu, tulisan ini tidak hendak menghakimi media apapun itu termasuk cetak, elektronik dan lain sebagainya. Tulisan ini berupaya membuka dan merefleksikan secara kritis mengenai praktek-praktek pertarungan opini yang bermuara pada penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia.

Strukturasi: Sebuah Alternatif Perspektif

Tidak mudah membaca Indonesia yang penuh dengan ragam tekanan kepentingan sekaligus penuh dengan teka-teki tak terduga. Kesulitan membaca Indonesia ini menjadi lebih lengkap jika seorang intelektual, ilmuwan atau siap saja yang hanya melihat Indonesia dari satu perspektif saja. Dinamika Indonesia disatu sisi dapat dinalar secara rasional logis namun disisi yang lain tidak dapat dinalar sebagaimana cara kerja akal manusia. Hal ini yang kemudian banyak ilmuwan sosial barat yang terheran-heran dengan bangsa ini. Saat krisis 98, sebagian pengusaha gulung tikar namun sebagian besar masyarakat dapat hidup sebagaimana biasa, bahkan berjualan dengan gembira ditengah-tengah ribuan demonstran di gedung DPR tahun 1998. Demikian pula era penjajahan. Ada pendapat bahwa *“Belanda tidak berhasil menjajah Indonesia selama 350 tahun”*, melainkan *“Belanda berupaya menjajah Indonesia selama 350 tahun namun gagal”*.

Baik era penjajahan maupun era 98 atau era-era lainnya yang pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, kesemuanya tentu terjadi berkat interaksi dan relasi antara agen dan struktur sebagaimana yang digagas oleh Antony Giddens. Kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara tentu tidak sekedar kumpulan tindakan individual, juga tidak bertumpu pada agen atau struktur semata melainkan merupakan interaksi keduanya. Agensi dan struktur saling mempengaruhi, memperkuat bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Giddens mengistilahkannya dengan strukturasi. Perspektif ini menitikberatkan pada hubungan dualitas antara agensi dan struktur serta praktek-praktek sosial yang ditata menurut ruang dan waktu (Giddens, 1984: 2).

Perspektif strukturasi sejatinya tidak hanya melihat peran struktur, melainkan juga menelaah peran agen, relasi sosial serta praktek sosial. Lebih jauh Vincent Mosco berpendapat bahwa strukturasi merupakan pintu masuk untuk mengkaji interaksi struktur dan agen dalam ekonomi politik (Mosco, 1996 : 215). Dalam kaca mata Giddens, struktur merupakan seperangkat aturan dan sumberdaya. Sumber daya ini kemudian terbagi menjadi dua yaitu sumberdaya alokatif dan sumberdaya otoritatif. Sumberdaya alokatif melekat pada dominasi manusia atas dunia materi. Sedangkan sumberdaya otoritatif merujuk pada dominasi manusia atas dunia sosial.

Sumber daya otoritatif erat kaitannya dengan relasi antara aktor dan struktur dalam asosiasi interaksi dan timbal balik. Ketika dua sumberdaya tersebut dapat dikuasai, memungkinkan individu untuk mewujudkan kekuasaan yang pada akhirnya memberi peluang individu mendominasi pihak lain. Penguasaan sumberdaya tersebut juga membuka peluang individu dalam menciptakan struktur dominasi. Mengenai sumberdaya alokatif dan otoritatif dalam konteks Indonesia akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kembali ke persoalan agen dan struktur. Relasi antara agen dan struktur di Indonesia dijumpai oleh dua kekuatan sekaligus, kekuatan modal dan kekuatan politik. Keduanya dapat saja disebut kekuatan namun tidak menutup kemungkinan hal itu menjadi kelemahan, yang kemudian dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga berskala internasional untuk mengekspansi kekuasaannya dengan pemberian rumus-rumus kebijakan yang memberatkan bahkan cenderung mengeksploitasi. Hal serupa terjadi di negara-negara lain khususnya negara yang termasuk kedalam kategori dunia ketiga.

Dalam praktik yang terjadi di dunia ketiga terdapat dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang lebih menekan pada kapital atau modal. Kedua pendekatan sumber daya manusia sebagai modal utama yang melahirkan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. (Dawam Raharjo, 2009: 41). Bagi Dawam Raharjo, yang terjadi saat ini adalah pendekatan yang pertama yaitu pendekatan kapital. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kedua pendekatan itu bercampur baur ditengah silang sengkabut kepentingan ekonomi sekaligus politik.

Pendekatan yang pertama ini tidak jarang dipraktekkan oleh negara-negara maju untuk memberdayakan dan memperdaya negara-negara berkembang untuk tunduk dan patuh pada resep-resep ekonomi yang diberikan. Negara-negara berkembang yang kesulitan mendapatkan modal, mendapat pinjaman modal yang tidak sedikit. *World Bank* misalnya, memberikan bantuan pinjaman jangka panjang ke negara-negara berkembang guna membiayai infrastruktur, waduk/dam, pembangkit tenaga listrik, jembatan, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur lainnya. (Amies R, 2008: 95).

Guna mengembalikan modal yang telah dipinjam itu, negara dituntut untuk mengembalikan melalui proses industrialisasi dengan tetap berprinsip “modal sekecil-

kecilnya, dan untung sebesar-besarnya”. Paket resep ekonomi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka diterima sebagai resep yang dianggap paling mujarab. Proses menerima tersebut melalui proses pertarungan opini baik opini pada arus bawah maupun opini pada arus atas atau keduanya.

Pertarungan Opini: Antara Opini Elit, Publik dan *Pseudo Public*

Opini arus bawah merujuk pada kata “publik”. Sementara opini arus atas melekat pada para elit. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa dan siapa yang menciptakan opini? Bagaimana motifnya? Apakah diciptakan oleh sebagian kalangan masyarakat ataukah para elit lah yang menciptakan opini untuk kemudian di”amini” oleh masyarakat?. Pada faktanya, kedua-duanya terjadi di lapangan. Artinya, disatu sisi masyarakat secara tidak langsung menciptakan opini, namun disisi yang lain, sebagian para elit juga cukup berhasil dalam merancang atau membentuk opini atas suatu isu. Kemudian disepakati bersama oleh sebagian besar masyarakat bahwa opini tersebut merupakan opini publik dan bukan opini para elit. Dialog mengenai opini selalu terbatas dalam kelompok atau kalangan tertentu serta cenderung homogen. Artinya, atmosfer berfikir, bertindak bahkan mengambil keputusan digambarkan sebagai sesuatu yang sama-sama berfikir, sama-sama merasakan serta sama-sama menanggung segala akibatnya. Hal ini sejalan dengan argumentasi Jurgen Habermas yang mengatakan bahwa diskusi politik sebagian besar terbatas pada kalangan tertentu, yang bagaimanapun lebih banyak menciptakan iklim yang homogen bagi pembentukan opini (Jurgen Habermas, 2007, 298).

Dalam kontestasi opini, seringkali atasnama publik. Meskipun sejatinya publik hanya berperan sebagai pengkonsunsi informasi dan wacana serta ditempatkan hanya sebatas pelengkap legitimasi. Opini-opini yang dibangun tidak lagi betul-betul mewakili publik melainkan murni atas dasar ragam kepentingan elit namun atas nama publik. Pada muaranya, publik menjadi penonton pasif. Ironisnya publik turut digunakan sebagai alat legitimasi opini, namun tidak mendapatkan apa-apa atas hal itu. Jurgen Habermas mengistilahkannya dengan istilah *pseudo public*, publik yang semu. Mengenai Amerika misalnya, Edward S dan Noam Chomsky mengatakan bahwa opini publik di Amerika sangat diwarnai oleh opini pusat-pusat kekuasaan (Edward & Chomsky, 1988: 20-21)

Sebagai contoh yang lain, dalam konteks ke-Indonesia-an tentang sistem ekonomi misalnya, opini yang dibangun sebagian elit ekonom diantaranya bahwa sistem ekonomi yang produktif adalah sistem yang dekat dengan pasar. Sebagian besar elit pun menyerukan opini bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus dengan membuka investasi sebesar-besarnya, seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Pada intinya harus *market friendly*. Kita lupa bahwa logika pasar hanya berorientasi pada akumulasi modal dan kalkulasi laba, tanpa pertimbangan nurani, kemanusiaan apalagi peningkatan kesejahteraan. Bagaimana mungkin buruh dapat sejahtera jika logika pasar dan industri cenderung menghendaki pada upah yang rendah demi efisiensi biaya operasional.

Hampir sama saat negara dalam keadaan krisis moneter, para *spin doctor* atau aktor intelektual yang dapat memutar balikkan data dan fakta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri mencoba merintis opini dan dikte-dikte tentang solusi krisis dengan menjual aset-aset negara beserta sumber daya alamnya. Mengapa dikatakan opini dan dikte? Sebab peruntukannya memang dalam dua hal; *pertama*, sebagian besar opini ditujukan kepada masyarakat agar pilihan yang diambil mendapat dukungan penuh dari publik. *Kedua*, dikte itu lahir dan hadir untuk menekan pengelola negara agar mengikuti dikte dengan sederatan target dan tujuan. Sebagaimana yang telah diketahui, opini-opini yang dibangun serta dikte-dikte yang dirintis, secara substantif sebagian besar ingin kembali menguasai Indonesia sebagaimana penjajah terdahulu namun dengan cara yang baru. Cara yang baru itu dapat berupa opini, regulasi, paket kebijakan dan lain sebagainya. Pemaparan tentang dikte IMF mengenai industri penerbangan dalam negeri (IPTN/PT.Dirgantara Indonesia) sebagaimana yang dipaparkan oleh BJ. Habibie dalam bukunya “Detik-Detik yang Menentukan” adalah salah satu contoh konkrit mengenai praktik ini.

Dalam sebuah acara di Jakarta tahun 2006 Mahatir Muhammad pernah mengatakan bahwa:

“Neo-colonialism is not a fancy term carried by president Soekarno. It is real. We Feel it as we come under the control of agencies owned by our former colonial masters”

Neo-kolonialisme bukanlah istilah karangan Presiden Soekarno. Neo-kolonialisme itu nyata. Kita merasakannya tatkala kita hidup berada dibawah kontrol agen-agen yang dikendalikan oleh mantan penjajah kita. Pengendalian oleh agen-agen tersebut salah satunya melalui pengendalian opini serta pengendalian sekumpulan dikte. Opini terus digulirkan dan dimainkan, bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang dan bukan negara maju berdasarkan parameter dan indikator-indikator yang materialistis. Terminologi “negara berkembang” dan “negara maju” dirasa sangat politis dengan alat ukur yang juga politis. Ketika Indonesia masuk ke dalam kategori sebagai negara berkembang (apalagi saat krisis), paket bantuan berupa pinjaman atau hutang segera disiapkan. Tentu tulisan ini tidak membahas secara detail mengenai hutang-piutang itu sebab telah banyak tulisan yang lebih detail untuk persoalan tersebut. Proses penguasaan Indonesia tidak hanya berhenti di wilayah opini, regulasi dan kebijakan-kebijakan melainkan berlanjut kepada penguasaan atas sumber daya.

Indonesia & Pertarungan dalam Penguasaan Sumber Daya

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian awal pembahasan bahwa mengenai sumber daya, Antony Giddens membaginya menjadi dua; *pertama*, sumber daya alokatif dan *kedua*, sumber daya otoritatif. Sumberdaya alokatif melekat pada pada dominasi manusia atas dunia materi. Sedangkan sumberdaya otoritatif merujuk pada dominasi manusia atas dunia sosial. Pada poin sumber daya alokatif kita ajukan pertanyaan sederhana; apakah bangsa Indonesia telah betul-betul merdeka terhadap tekanan modal finansial? Atau justru mengalami ketergantungan? Apakah Indonesia menguasai pasar domestiknya? Atau justru dikuasai oleh pihak lain? Semisal kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mau minum air mineral terkenal, mayoritas sahamnya milik Danone Prancis, mau mandi berjumpa dengan produk-produk PT. Unilever yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Belanda. Setelah mandi siap-siap berangkat ke kantor menggunakan kendaraan buatan Jepang. Saat tiba dikantor, HP berdering dan semua buatan luar, Samsung (Korea), Blackberry (Kanada), Nexian (Taiwan) dan lain-lain. Lanjut kerja bertemu komputer, laptop, printer, sistem operasi komputer yang kesemuanya produksi dan sahamnya milik luar negeri. Ini jika diteruskan tidak akan ada habisnya. Sampai-sampai, peniti sekecil itu pun “*made in*

china”. Mungkin, yang betul-betul produk dalam negeri hanya produk susu yang setia keliling di tiap rumah dengan nada dan suara; “susu murni nasiionaall...”.

Modal dan produk asing masuk dengan mudah ke Indonesia, sementara karya anak negeri sangat sulit diterima di negeri sendiri bahkan tersingkir dengan tertib. Sebagaimana pengakuan BJ.Habibie tentang IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara).

“Pesawat N250 turboprop bermesin dua untuk 50 penumpang dengan memanfaatkan tenaga sumber daya manusia sendiri dari seluruh nusantara. Demikian pula kapal kontainer, semi kontainer, bulk carier, tanker jenis carakajaya (3.000-5.000 ton) dan jenis palwobuono (20.000-40.000 ton) (Habibie, 2006: 272)

Sulit diterimanya produk buatan dalam negeri sangat mungkin erat kaitannya dengan cara berfikir berupa gelembung opini yang secara bersama-sama bersepakat bahwa produk lokal tidak mutu, kurang prestise, ketinggalan zaman serta sebutan lainnya yang tidak enak didengar. Secara tidak langsung, produk lokal terkunci mati sementara produk luar bebas berkembang dan bebas berekspansi hingga ke pelosok negeri. Dulu, nenek moyang berjuang mengusir penjajah dalam bentuk fisik dan sekarang anak cucu membuka diri untuk “dijajah” dalam model dan bentuk baru serta modern yang bernama neo-kolonialisme. Hal inilah yang kemudian mengantarkan Indonesia kedalam ketergantungan-ketergantungan dalam berbagai aspek dimensi. Dawam Raharjo mengatakan bahwa Indonesia terjebak kedalam tiga sindrom ketergantungan, yaitu ketergantungan modal finansial, ketergantungan pasar, dan ketergantungan teknologi dari luar negeri (Dawam Raharjo, 2009: 44). Ketergantungan modal finansial setiap periode di negeri ini memiliki dominasi negara tertentu, memiliki ciri khas serta besaran jumlah bantuannya. Suatu kenyataan periode 1950an misalnya, Perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan China (M.C Ricklefs, 1991: 359). Di era sekarang, dominasi itu tentu kian kompleks mengingat Indonesia merupakan pangsa pasar yang strategis dengan harga bahan baku murah serta tersedianya tenaga kerja murah.

Lembaga keuangan internasional selalu siap sedia memberikan paket bantuannya disertai sisipan ragam kepentingannya. Lembaga keuangan internasional menjadi semacam kekuatan tak terlihat namun berimbas besar bagi negara. Chossudousky menyebutnya sebagai kekuatan yang berada di belakang sistem.

“Kekuatan-kekuatan di belakang sistem ini adalah bank-bank global dan lembaga-lembaga keuangan, raksasa minyak dan energi dan lain sebagainya, yang mengarang berita dan secara terbuka mempengaruhi jalannya peristiwa-peristiwa dunia melalui pendistorsian fakta-fakta”.
(Chossudovsky M, 2007: 7)

Ketergantungan selanjutnya ialah ketergantungan pasar. Salah satu ciri ketergantungan pasar dapat dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung tunduk dan patuh pada mekanisme pasar. Terakhir, ketergantungan teknologi. Cukup banyak contoh yang dapat mewakili ketergantungan teknologi ini. Teknologi pengolahan minyak, e-ktip, termasuk ketergantungan pada sektor telekomunikasi dan transportasi seperti jaringan kereta api, infrastruktur jalan dan lain sebagainya.

Selanjutnya mengenai sumberdaya alokatif. Sebagaimana yang telah disinggung diawal, sumberdaya jenis ini merujuk pada dominasi atas dunia sosial. Penguasaan dalam ruang-ruang sosial dimulai dari interaksi sosial dan budaya dengan berbagai benturan-benturan nilai, sikap hingga gaya hidup. M.M. Kraidy menyebutnya sebagai praktek *transnasional culture* (M.M Kraidy, 1972: 15). Praktek pertarungan gaya hidup mungkin dapat dilihat tentang bagaimana pemuda dan pemudi kita lebih bangga meniru gaya hidup *western*, dan mulai tidak percaya diri dengan gaya hidup sederhana penuh harmoni sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh orang-orang tua terdahulu. Gaya hidup yang muncul adalah gaya hidup yang cenderung eksploitatif satu sama lain dan tentunya sangat konsumtif. Pada posisi inilah Jean Baudrillard mengistilalkannya sebagai para pahlawan produksi sekaligus pahlawan produksi. (Jean Baudrillard, 2004: 36)

Food, film & fashion (3 F) yang makin menjamur bergaya *western* merupakan *soft diplomacy* yang perlahan-lahan berhasil masuk kedalam alam bawah sadar anak bangsa. Tidak berarti tidak boleh atau anti terhadap *food, film & fashion* yang datang dari barat, melainkan dapat bersikap kritis serta tidak *nyinyir* atas apa saja yang berakar dari dunia timur. *Food, film & fashion* ini hanya sekedar contoh kecil tentang bagaimana dunia barat selalu menjadi parameter dan acuan utama bagi negara-negara lainnya. Produk, *style* apapun asal didatang dari dunia barat dianggap yang utama sementara apapun itu asal berada di dunia timur, ia tetaplah pinggir, kuno dan melekat padanya kata-kata; ketinggalan zaman. Sangat mungkin ini merupakan salah

satu bentuk dari kolonialisasi kesadaran dari barat ke timur. Proses dari kolonialisasi kesadaran ini erat kaitannya dengan penguasaan sumber daya frekuensi dengan gerbong imperealisme budaya dibelakangnya. Ironisnya, publik hanya sebagai penonton pasif dan sebatas pelengkap. Sebab mayoritas dikuasai oleh jaringan korporasi global dengan turunan spasialisasi industrinya baik secara vertikal maupun horizontal.

Penutup

Tidak mudah membaca Indonesia dengan ragam kompleksitas masalahnya. Mulai dari pertarungan opini hingga perebutan dalam penguasaan sumber daya yang tersedia. Silang sengkabut kepentingan ekonomi dan politik mendorong lahirnya opini-opini yang semu, dangkal sekaligus artifisial. Semua dibalut atas nama publik. Padahal publik hanya digunakan sebatas alat legitimasi serta sebatas citra kata yang tanpa referensi. Muara dari kontestasi-kontestasi itu tidak lain pada penguasaan sumber daya dengan turunan akumulasi modal dan kalkulasi labanya. Penguasaan sumber daya alokatif dan sumber daya otoritatif oleh pihak lain mengantarkan pada ketergantungan yang tak berkesudahan. Ketergantungan itu terjadi pada tiga aspek; *pertama* modal finansial, *kedua* pasar dan *ketiga* teknologi. Oleh karenanya kemandirian yang dirintis mau tidak mau harus bermuara pada kemandirian modal finansial, kemandirian pasar serta kemandirian teknologi. Kemandirian ini tidak dalam arti berdiri sendiri dan anti yang lain melainkan saling sinergis namun tetap berdikari. Sehingga terjadi sebuah pembangunan yang saling berketergantungan (*interdependent development*) demi tercapainya cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Baudrillard Jean.(2004). *Masyarakat Konsumsi*. Penerj. Wahyunto, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Chossudovsky, Michael.(2007). *Amerika's War on Terrorism*, KL: Thinkers Library
- Edward S & Noam Chomsky.(1988). *Manufacturing Consent: The Political and economy of mass media*, New York: Pantheon Box
- Giddens Anthony. (1984). *The Constitution of Society outline of the theory Structuration* .Cambridge UK: Polity Press.
- Habermas Jurgen, (2007). *The Structural Transformation Of Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. terj. Yudi Santoso, Yogyakarta, Kreasi Wacana
- Habibie, Bacharudin Yusuf. (2006). *Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*: Sage Publications.
- Mosco Vincent. (1996). *The Political Economy of Communication: rethinking and renewal*.London: Sage Publications.
- Kraidy, M.M. (1972). *Hybridity or the Cultural Logic of Globalization*. Philadelphia: Temple University Press
- Rais, Amien. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia*.Yogyakarta: PPSK Press.
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*.Yogyakarta: GMU Press.

Jurnal:

- Raharjo Dawam. (2009).*Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia*. Vol.28, No.2